

311.75
TK1
P 9

POTENSI DAN PERAN STRATEGIS PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER DANA PEMBANGUNAN

Disusun Oleh

Nanik Trihastuti, S.H.
NIP. 131 763 893

Disampaikan pada diskusi bagian Hukum Internasional, September 1999

UNIVERSITAS DIPONEGORO
No. Daftar:
Tgl.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG



1999

Nanik Trihastuti
NIP. 131 763 893

POTENSI DAN PERAN STRATEGIS PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER DANA PEMBANGUNAN

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan di segala bidang.

Dewasa ini, arah kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah pada dasarnya bertumpu pada Trilogi Pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, disamping usaha mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap.

Pembangunan Indonesia dalam lima Repelita pertama telah menunjukkan keberhasilan, keberhasilan ini dapat kita lihat bahwa selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun-tahun akhir PJPT I pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 7,48% (1994). Memasuki tahun I PJPT II (1995) pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 8,07%. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada tingkat atas pertumbuhan negara-negara di dunia.¹⁾

Pada PJPT II, pertumbuhan ekonomi akan diusahakan sampai pada tingkat pertumbuhan sebesar 7% per tahun. Untuk dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi ini, salah satu faktor yang harus dipacu adalah

¹⁾ Tri Budiono, *Memacu Investasi Dengan Instrumen Pajak*, Majalah Refleksi Hukum, Oktober 1996, hlm. 61.

peningkatan investasi, dengan prediksi investasi yang dibutuhkan sebesar 815 trilyun rupiah.²⁾

Dari jumlah tersebut, dunia usaha diharapkan dapat menyumbang paling besar sekitar 77%, sedangkan sisanya 23% baru diharapkan peran pemerintah, hal ini berarti bahwa dalam menghadapi pembangunan dimasa depan, pemerintah semakin memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian, serta secara perlahan-lahan peranan langsung dari pemerintah diperkecil.

Oleh karena itu, pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan.

Untuk mendorong pengembangan dunia usaha, pemerintah telah mengambil kebijakan berupa deregulasi dan debirokratisasi dalam berbagai sektor. Kebijakan ini memiliki tiga sasaran yang meliputi :

1. mengurangi rantai birokrasi agar memperlancar kemampuan pelayanan kepada masyarakat.
2. mengurangi biaya-biaya (penyebab ekonomi biaya tinggi) yang semestinya tidak perlu dikeluarkan dunia usaha.
3. menyediakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong pengembangan penanaman modal.³⁾

²⁾ Edy Purwo Saputro, *Mengkaji Investasi nasional Dalam Tahun 1996*, Suara Pembaharuan, 8 Juni 1996, hlm. 2.

³⁾ Singgih Riphart, *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pasar Modal, Persiapan Meruju Era Global*, dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir Indonesia Bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 158.

Untuk memenuhi kebutuhan akan biaya pembangunan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh dana dari dalam negeri, dengan maksud bahwa disamping dana dari luar negeri dapat dikurangi, yang berarti mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri, penggunaan dana dari dalam negeri mempunyai arti yang sangat penting, khususnya dalam rangka mengatur prioritas pembangunan, dimana aspek aspirasi dan partisipasi masyarakat dapat turut dikembangkan.

Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengaktifkan kembali kegiatan pasar modal di Indonesia.

Hal ini selain untuk menghadapi tuntutan perkembangan dunia usaha dalam era globalisasi dewasa ini, juga dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan menuju pada pemerataan masyarakat, serta untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana, sehingga dapat dipergunakan secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Dengan kebijaksanaan tersebut, pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat secara tepat, juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham-saham perusahaan yang go-public oleh sebagian masyarakat pemilik modal yang berminat menginvestasikan modalnya melalui saham tersebut.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pasar modal dalam pembiayaan pembangunan, maka penulis akan membahasnya dalam makalah

dengan judul "Potensi dan Strategi Pasar Modal Sebagai Sumber Dana pembangunan".

Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah potensi dan peran strategis pasar modal sebagai sumber pembangunan ?
2. Upaya-upaya apakah yang harus dilakukan untuk melaksanakan peran strategis dari pasar modal sebagai sumber dana pembangunan ?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Potensi Dan Peran Strategi Pasar Modal Sebagai Sumber Dana Pembangunan

Dalam masa pembangunan sekarang ini, salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah menjamin kesinambungan pembangunan nasional, yaitu dengan mengusahakan tersedianya dana-dana bagi pembiayaan pembangunan.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, pemerintah tidak dapat mengandalkan pada hasil penjualan komoditi primer hasil pertambangan (seperti minyak bumi, gas bumi, timah, dan lain-lain) dan bahan mentah hasil pertanian di pasar internasional karena rendahnya harga. Keadaan ini menyulitkan Indonesia untuk mendapat dana untuk membiayai investasi dalam negeri dan devisa untuk membiayai impor barang modal serta bahan baku dalam rangka pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut.

Demikian pula untuk mendapatkan dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional, dirasakan sulit. Beberapa penyebabnya antara lain adalah :

1. Negara-negara maju masih enggan untuk mengalirkan dana ke negara-negara miskin dan sedang berkembang guna mempercepat pembangunan ekonominya, meskipun "perang dingin telah berakhir", bahkan mereka saat ini menuntut keterbukaan pasar yang sama bagi semua negara (open-market democracies) di dunia.

2. Reformasi Ekonomi yang sedang dilakukan oleh negara-negara Eropa Timur, eks Rusia, RRC dan Vietnam juga mempertajam persaingan ini.
3. Dana jangka panjang dengan tingkat bunga rendah semakin sulit diperoleh karena ekonomi Indonesia dipandang sudah lebih mampu ⁴⁾

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pendahuluan, bahwa pemerintah di dalam kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi telah menetapkan berbagai sasaran yang akan dicapai. Salah satu sasaran tersebut adalah kebijaksanaan dalam rangka memobilisasi dana domestik maupun sumber-sumber luar negeri.

Kebijaksanaan ini sangat penting, karena :

1. Kecenderungan ekonomi dunia kepada pasar bebas yang mendorong arus uang dan arus modal bergerak lebih bebas tanpa hambatan, terbuka pikiran yang lebih leluasa untuk memilih tempat dan jenis investasi yang paling menguntungkan dan sebagai konsekuensi dari keadaan diatas memaksa setiap negara harus mendorong dunia usahanya untuk terus mengikuti kecenderungan perekonomian dunia dan berperilaku secara efisien.
2. Ketergantungan ekonomi Indonesia akan hutang luar negeri semakin besar dari waktu ke waktu.
3. Permintaan masyarakat (domestik dan asing) terhadap barang dan jasa, semakin meningkat, di sisi lain Indonesia sebagai salah satu negara di

⁴⁾ Marzuki Usman dan Brahmantio Isdijoso, *Peranan Perbankan dan Pasar Modal Dalam Meningkatkan Kualitas dana Pembangunan Pada Era Pasar Bebas Dunia, Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Institut Bankir Indonesia Bekerjasama Dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 62.

Asia Timur memiliki *natural resources* yang melimpah, bahkan sebagian besar diantaranya belum terjamah secara ekonomis.

4. Memanfaatkan besarnya arus masuk uang dan modal dari luar negeri.⁵⁾

Untuk mewujudkan peran masyarakat yang demikian besar dalam pembiayaan pembangunan tersebut, Indonesia perlu membangun dan memiliki sistem keuangan (*Financial System*) yang tangguh. Dimana salah satu fungsi utama dari sistem keuangan adalah *Financial Intermediation* yaitu memobilisasi dana dari para penabung yang jumlahnya ribuan atau bahkan jutaan dan menyalurkannya pada para investor/pengusaha. Pada perekonomian yang baru berkembang, fungsi intermediasi ini biasanya terkonsentrasi pada satu jenis lembaga keuangan saja, yakni perbankan, sejalan dengan perkembangan secara bertahap akan tumbuh dan berkembang pula berbagai jenis lembaga keuangan lain, seperti, asuransi, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank (*leasing*, modal *ventura*, anjak piutang, dan lain-lain) dan pasar modal.⁶⁾

Menurut data penghimpun dana masyarakat pada tahun 1995, perbankan dan pasar modal merupakan lembaga keuangan dengan kemampuan terbesar memobilisasi dana masyarakat Indonesia.

Pada tahun itu perbankan berhasil memobilisasi dana masyarakat sebanyak Rp. 214.764 milyar dan pasar modal sebanyak Rp. 44.089 milyar yang berarti

⁵⁾ Nurwardono, P, *Peningkatan Efektivitas Sektor Keuangan Untuk Kemandirian Pembiayaan Pembangunan*, Analisis CSIS, Tahun XXV, Nomor 1 1996, hlm. 63.

⁶⁾ Marzuki Usman dan Brahmantio Isdijoso, *Op.Cit*, hlm. 64-65.

menguasai sekitar 91% dari hasil mobilisasi dana masyarakat yang dilakukan sistem keuangan Indonesia.⁷⁾

Pada mulanya, dunia perbankan masih merupakan tumpuan harapan untuk membiayai kegiatan bisnis di Indonesia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, keberadaan lembaga perbankan dinilai oleh kalangan dunia usaha membebani *cost of capital* yang tinggi (melalui tingkat bunga yang tinggi), sementara di sisi lain *cost of capital* yang dikenakan di negara-negara pesaing justru semakin menurun dan mendorong *cost of production* pada tingkat yang lebih efisien sehingga harga jual barang dan jasa dapat ditekan pada tingkat rendah.⁸⁾

Terlebih dengan adanya krisis moneter, serta terpuruknya sektor perbankan sebagai akibat penyelesaian dan pembenahan atas pinjaman-pinjaman yang tingkat kemacetannya cukup tinggi, mengakibatkan kesulitan bagi para pengusaha dalam menjalankan operasi usahanya.

Kondisi ini masih ditambah dengan adanya likuidasi beberapa bank yang mengakibatkan kurangpercayaan masyarakat terhadap jasa perbankan.

Dengan kondisi seperti ini, salah satu upaya yang telah dan terus dilaksanakan pemerintah adalah dengan meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

⁷⁾ Ibid

⁸⁾ Singgih Riphah, Deregulasi dan Kecenderungan Fkonomi Global, *Suatu Analisis Kinerja Sektor Pasar modal di Indonesia*, dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Institut Banker Indonesia Bekerjasama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 21.

Dipandang dari sisi ekonomi makro, pasar modal merupakan suatu piranti untuk melakukan alokasi sumber daya secara optimal dalam perekonomian dan merupakan sumber pembiayaan yang tidak bersifat inflatoir. Melalui pasar modal, sumber daya ekonomi dialokasikan sedemikian rupa sehingga kedudukan bergeser dari titik Pareto inefficiency ke titik Pareto Efficiency .⁹⁾

Implikasi lebih jauh dari berfungsinya pasar modal sebagai piranti dalam alokasi sumber daya ekonomi secara optimal adalah meningkatnya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang semakin baik.¹⁰⁾

Peran strategis pasar modal disini merupakan usaha ke arah menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan sekaligus meningkatkan sumber-sumber tabungan masyarakat, ini berarti pasar modal berperan serta dalam pembangunan pada umumnya, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dananya ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Oleh karena itu upaya penarikan dana melalui penjualan saham atau obligasi kepada masyarakat melalui pasar modal adalah langkah yang merupakan keharusan di dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu semua pihak harus diupayakan agar terjamin kepentingannya, sehingga untuk mendapatkan alternatif serta penyusunan strategi agar program pengembangannya mantap, perlu ditentukan prioritas pembangunan secara tepat.

Berkaitan dengan hal ini, pasar modal harus diperhitungkan dalam penyusunan strategi pembangunan Indonesia, dengan pertimbangan bahwa :

⁹⁾ Marzuki Usman dan Brahmantio Isdijoso, Op.Cit, hlm. 77-78.

¹⁰⁾ Ibid.

1. Dalam melaksanakan pembangunan sebagian besar kebutuhan dana pada prinsipnya harus bersumber dari potensi dalam negeri.
2. Bahwa peranan swasta, perusahaan milik negara dan koperasi yang kegiatannya dibidang usaha diharapkan semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi ¹¹⁾

Pada akhirnya untuk membuktikan seberapa besar kontribusi pasar modal sebagai sumber dana pembangunan tidak hanya ditunjukkan oleh data yang bersifat kuantitatif seperti meningkatnya volume perdagangan dan nilai kapitalisasi pasar, jumlah perusahaan yang go publik serta besarnya dana yang telah diinvestasikan, akan tetapi juga ditunjukkan oleh data yang bersifat kualitatif seperti peningkatan kemampuan perusahaan, peningkatan kualitas keterbukaan informasi pasar modal serta diberlakukannya praktek internasional di pasar modal Indonesia. ¹²⁾

B. Upaya-Upaya Yang Harus Dilakukan Untuk Melaksanakan Peran Strategis Dari Pasar Modal Sebagai Sumber Dana Pembangunan

Pada saat ini terdapat berbagai jalan untuk meningkatkan perekonomian. Salah satu cara terbaik adalah dengan memfokuskan diri terhadap pengembangan usaha dengan lingkup regional dan mengupayakan bagaimana mendapatkan jalan agar regionalisasi tersebut dapat berinteraksi dengan ekonomi global.

¹¹⁾ Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 44.

¹²⁾ Jusuf Anwar, *Demokrasi Perusahaan Sebagai Mobilisasi Dana Masyarakat Dan Pemerataan Kepemilikan Perusahaan*, Jakarta, September, 1998, hlm. 4.

Dengan terus berkembangnya perubahan-perubahan yang bersifat struktural serta perkembangan perdagangan dan investasi ke arah yang lebih bersifat global, maka ekonomi dunia dalam perkembangannya ditandai oleh tiga karakteristik utama, yaitu :

1. Globalisasi menimbulkan hubungan yang semakin kuat sehingga mendorong pada upaya penguatan integrasi perekonomian secara global. Implikasinya adalah pada masa mendatang akan semakin dituntut penerapan prinsip-prinsip perdagangan bebas.
2. Ketidakpastian yang melingkupi perekonomian dunia dalam berbagai aspeknya diperkirakan akan berlanjut. Aliran modal senantiasa mencari tempat dengan pendapatan yang paling tinggi, dan selalu bergerak dari suatu negara ke negara lain, mengikuti trend perkembangan pendapatan negara.
3. Batas ekonomi suatu negara akan semakin kabur terutama dengan dimungkinkannya *Cross-listing* di pasar internasional.¹³⁾

Dengan semakin berkembangnya kegiatan pengembangan perusahaan di tingkat global yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, maka perusahaan-perusahaan semakin giat mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Untuk itu pandangan para pemilik perusahaan diarahkan ke pasar modal baik di dalam negeri sendiri maupun di negara lain.

¹³⁾ Syahrir Ika dan Singgih Riphah, *Strategi Pengendalian Pasar Modal Indonesia dan Pengaruh Investor Asing, dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Institut Bankir Indonesia Bekerjasama dengan Jurnal Kenangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hlm. 95.

Berbagai perusahaan dari suatu negara menjual sahamnya di pasar modal negara-negara lain untuk mendapatkan tambahan dana. Dengan demikian berarti pemodal dari suatu negara dapat ikut melakukan investasi di negara lain.¹⁴

Oleh karena itu untuk mempertahankan perekonomian suatu negara agar tetap tumbuh dengan baik, maka diperlukan penciptaan iklim sebaik mungkin untuk menarik minat perusahaan global melakukan investasi di negara yang bersangkutan, hal ini harus dilakukan agar struktur moneter dalam negeri menjadi lebih kuat dan dapat mendorong perkembangan produksi, yang pada gilirannya dapat mendorong pendapatan perusahaan dan pendapatan negara.

Dalam era globalisasi, modal dapat bergerak dengan cepat (*Footlose flow of capital*) tergantung di negara mana yang menyajikan *rate of return* yang paling tinggi dan risiko yang lebih rendah. Untuk itu harus dapat diciptakan iklim investasi yang baik sehingga dapat memanfaatkan peluang internasionalisasi keuangan tersebut.

Salah satu instrumen investasi yang akan diburu investor adalah portofolio investasi melalui pasar modal (*capital market*). Dan untuk meraih investor sebanyak-banyaknya, pasar modal di Indonesia harus mampu bersaing di pasar internasional. Untuk dapat memenangkan persaingan di pasar internasional, harus dapat diciptakan efisiensi dan market Confidence di pasar modal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga internasional, orientasi pengembangan pasar modal dunia menuju millenium ketiga ini adalah menciptakan pasar modal yang dikenal likuid dan efisien. Demikian pula dengan

¹⁴⁾ Asril Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

arah pengembangan pasar modal Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, juga menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Kelikuidan pasar modal akan tercipta jika transaksi efek terjadi dalam keteraturan dan kewajaran. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka pasar modal Indonesia perlu meningkatkan, infrastruktur pasar kliring dan penyelesaian transaksi, jenis instrumen yang diperdagangkan, pelayanan kepada nasabah dan pengembangan teknologi.¹⁵⁾

Sesuai dengan arah kebijaksanaan dibidang ekonomi dalam GBHN 1999-2004 arah kebijakan untuk pengembangan pasar modal adalah pengembangan pasar modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundangan sesuai dengan standar Internasional dan diawasi oleh lembaga independen.

Menurut Hasan Zen Mahmud, untuk dapat mencapai efisiensi bursa, secara makro perlu diperhatikan dua hal, yaitu :

1. Pasar Modal harus bisa menstimulir berkembangnya motif ekonomi dengan cara tidak boleh terlampau mengekang pasar.
2. Pasar modal harus diatur lebih ketat (*heavily regulated*), akan tetapi permainannya harus fair dan harus tercipta level playing fields, pengetatan tersebut terutama pada insider trading information dan take over. Tetapi di sisi lain, terhadap emiten, kebijakannya justru diperlonggar, dimana para emiten misalnya diperbolehkan

¹⁵⁾ Herwidiyatmo, *Scriptless Trading dan Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Indonesia*, Makalah, 2000, hlm. 4.

memobilisasi atau menambah dana melalui right issue, artinya diprioritaskan bagi pemegang saham.¹⁶⁾

Untuk mewujudkan pasar modal yang efisien, telah diterapkan adanya keharusan pemenuhan kewajiban atas transparansi atau diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi yang disampaikan oleh para pelakunya, dimana menurut pasal 1 angka 7 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta penjelasannya, prinsip keterbukaan dalam pasar modal sangat penting karena setiap peristiwa material yang diinformasikan kepada publik dapat berpengaruh terhadap keputusan investasi pemodal dan harga efek yang bersangkutan.

Sesuai dengan visi pasar modal Indonesia yaitu "mewujudkan pasar modal Indonesia sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global," maka telah ditetapkan strategi pengembangan pasar modal Indonesia, yaitu :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap *Good Corporate governance*;
2. Harmonisasi peraturan dan kelembagaan ;
3. Pengembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia secara terpadu;
4. Penerapan keamanan dan kualitas jasa mengacu pada standar internasional ;
5. Pengembangan pasar dan instrumen pasar modal.¹⁷⁾

Untuk mencapai peran strategis pasar modal sesuai dengan visi pasar modal tersebut di atas, maka upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan

¹⁶⁾ Syahrir Ika dan Singgih Riphath, Op .Cit. hlm. 89.

¹⁷⁾ Herwidiyemo, Op. Cit. hlm. 6.

meningkatkan program sertifikasi saham di Indonesia. Karena misi sertifikasi saham disamping akan memberikan tempat kepada investor golongan masyarakat menengah ke bawah seperti pegawai negeri, karyawan perusahaan, pensiunan, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, juga akan menepis anggapan yang mengatakan bahwa bursa pasar modal itu hanya memberi tempat bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Untuk itu hak-hak pemilik sertifikat saham perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memadai.¹⁸

Pada akhirnya untuk melaksanakan pengembangan pasar modal sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan tersebut di atas untuk semuanya tergantung kepada komitmen semua pelaku pasar modal untuk memenuhi segala kewajiban dan fungsinya masing-masing.

¹⁸ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 170.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pasar Modal Indonesia memiliki potensi dan peran strategis yang besar sebagai sumber dana pembangunan yang dilakukan dengan cara menghimpun dana masyarakat untuk pembangunan sekaligus meningkatkan sumber-sumber tabungan masyarakat.
2. Untuk dapat melaksanakan peran strategis pasar modal sebagai sumber dana pembangunan adalah dengan menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien sesuai dengan tuntutan para pemodal.

B. Saran

1. Dalam era globalisasi, investasi dalam bentuk financial asset tidak dapat diproteksi lagi, sehingga pemerintah harus dapat menciptakan iklim investasi yang efisien dan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan negara lainnya untuk dapat meraih investor sebanyak-banyaknya.
2. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan pasar modal dalam hubungannya dengan internasionalisasi pasar modal, perlu diperhatikan beberapa aspek penting terutama penyempurnaan perangkat peraturan, peningkatan profesionalisme kalangan pelaku dan penyempurnaan sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi efek di bursa.

DAFTAR PUSTAKA

Asril Sitompul, *Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Makalah:

Herwidiyatmo, *Scriptless Trading dan Arah Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Indonesia*, Makalah, 2000.

Jusuf Anwar, *Demokratisasi Perusahaan Sebagai Alat Memobilisasi Dana Masyarakat dan Pemerataan Kepemilikan Perusahaan*, Jakarta, September 1998.

Marzuki Usman dan Brahmantio Isdijoso, *Peranan Perbankan dan Pasar Modal Dalam Meningkatkan Kualitas Dana Pembangunan Pada Era Pasar Bebas Dunia, Dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.

Singgih Riphath, *Peranan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Pasar Modal, Persiapan Menuju Era Global, Dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.

-----, *Deregulasi dan Kecenderungan Ekonomi Global, Suatu Analisis Kinerja Sektor Pasar Modal di Indonesia, Dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.

Syahrir Ika dan Singgih Riphath, *Strategi Pengendalian Pasar Modal Indonesia dan Pengaruh Investor Asing, Dalam Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997.

Koran dan Majalah:

Edy Purwo Saputro, *Mengkaji Investasi Nasional Dalam Tahun 1996*, Suara Pembaharuan, 8 Juni 1986.

Nurwandono, P, *Peningkatan Efektivitas Sektor Keuangan Untuk Kemandirian Pembiayaan Pembangunan*, Analisis CSIS, Tahun XXV, No. 1, 1996

Tri Budiono, *Memacu Investasi Dengan Instrumen Pajak*, Majalah Refleksi Hukum, Oktober 1996

Perundang-undangan:

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004

UPT-PUSTAK-UNDIP